

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH PENGGERAK DI SMPN 3 CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

Faisol¹, Mufarriul Hazin²

1 faisol.21076@mhs.unesa.ac.id

2 mufarriulhazin@unesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan;
Sekolah Penggerak; SMPN 3
Camplong

Riwayat artikel:

Diterima 2025-07-14

Direvisi 2025-07-15

Diterima 2025-07-16

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong berjalan secara adaptif dan progresif. Komunikasi internal antara kepala sekolah dan guru telah berlangsung secara intensif, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh sistem komunikasi digital yang terstruktur. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana dilakukan secara optimal sesuai dengan kapasitas sekolah, meskipun masih dijumpai kendala teknis. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi yang tercermin dari keterlibatan aktif kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi sekolah telah diarahkan secara fungsional untuk mendukung program, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem SOP dan pelaporan formal. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong sangat dipengaruhi oleh sinergi antarkomponen pelaksana dan kepemimpinan sekolah yang partisipatif serta responsif terhadap tantangan.

Penulis yang sesuai:

Corresponding Author

Faisol.21076@mhs.unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi peradaban manusia serta alat untuk mencapai kemajuan individu dan masyarakat. Dalam pandangan filosofis, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai alat, tetapi juga sebagai proses esensial yang berkesinambungan untuk

membentuk manusia seutuhnya. Proses ini melibatkan pengembangan aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual seseorang. Filosofi pendidikan, dalam hal ini, menjadi pijakan bagi pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam merancang sistem pendidikan yang relevan, adaptif, dan bermakna untuk menjawab kebutuhan zaman (Hidayah, 2022). Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kamba, 2018). Dengan demikian, pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada keberhasilan intelektual semata, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan individu yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membentuk manusia yang utuh dan bermartabat, sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang holistik dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang geografis atau sosialnya, memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas (Oktavia, 2019).

Kebijakan Program Sekolah Penggerak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/M/2021 bertujuan mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia dengan menciptakan sekolah yang mampu mengembangkan Profil Pelajar Pancasila. Program ini menitikberatkan pada peningkatan hasil belajar siswa secara menyeluruh, yang mencakup kompetensi akademik (literasi dan numerasi) serta pengembangan karakter siswa. Sebagai kebijakan yang menggantikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020, program ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu (1) Meningkatkan kompetensi akademik dan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, (2) Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam memimpin satuan pendidikan menuju pembelajaran yang bermutu, (3) Membangun ekosistem pendidikan yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, (4) Mendorong terciptanya kolaborasi antara pemangku kepentingan di berbagai level, baik di sekolah, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Untuk mencapai tujuan tersebut, intervensi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan guru melalui pelatihan serta pendampingan. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan sumber daya manusia di sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, serta digitalisasi sekolah. Diharapkan sekolah yang mengikuti program ini mampu mengalami kemajuan signifikan, bahkan dapat menjadi pelopor dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Implementasi kebijakan Sekolah Penggerak menghadapi sejumlah hambatan yang berkontribusi pada keberhasilannya yang tidak merata. Beberapa faktor, seperti komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya manusia, dan dukungan yang minim dari birokrasi pendidikan daerah, menjadi kendala utama yang perlu diatasi (Suryani, & Aprillitavivayart 2023).

Kabupaten Sampang memiliki sejumlah sekolah, total sekolah binaan mencapai 1.297. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, jumlah total sekolah menengah pertama (SMP), baik negeri maupun swasta, yang tersebar di berbagai wilayah total jumlah sebanyak 315 sekolah, jumlah total SMP di wilayah Kabupaten Sampang cukup signifikan, mencerminkan potensi pendidikan yang besar untuk dikembangkan. Namun, dari sekian banyak sekolah yang ada, hanya dua sekolah, salah satunya yakni SMPN 3 Camplong yang menjalankan kebijakan Sekolah Penggerak. Hal ini menandakan adanya disparitas besar dalam penerapan kebijakan ini di tingkat kabupaten (Dewi & Riani, 2024) SMPN 3 Camplong adalah salah satu sekolah menengah pertama negeri yang terletak di Dusun Rampek Desa Plampaan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur. Sekolah ini memiliki posisi strategis di wilayah yang berdekatan dengan berbagai fasilitas masyarakat, sehingga memberikan akses pendidikan yang relatif mudah bagi siswa.

Meskipun SMPN 3 Camplong, telah terpilih sebagai Sekolah Penggerak di Kabupaten Sampang, implementasi Kebijakan Sekolah Penggerak di sekolah ini menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pencapaian hasil yang maksimal (Adawiyah, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan meneliti tentang implementasi Kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang, dengan fokus pada 4 variabel utama meliputi :

1. Bagaimana Komunikasi dalam Implementasi kebijakan sekolah penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang?
4. Bagaimana Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong, Kabupaten Sampang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan secara kontekstual dan naturalistik, sesuai dengan panduan yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan empat variabel dalam model George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Subjek dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru, serta staf manajemen sekolah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan keterlibatan aktif mereka dalam proses implementasi kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala sekolah dan beberapa guru yang dianggap memahami dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran dan praktik manajerial di sekolah, sementara dokumentasi meliputi dokumen kebijakan, notulensi rapat, program kerja, serta laporan pelaksanaan Sekolah Penggerak. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis dilakukan secara simultan selama proses pengumpulan data, guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai implementasi kebijakan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Hasil temuan penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang melalui model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh pihak sekolah. Implementasi Kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi empat faktor utama yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keempat faktor tersebut berpengaruh besar

dalam pelaksanaan program, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pembahasan berikut disusun berdasarkan masing-masing sub fokus yang telah ditentukan.

3.1. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong menunjukkan beberapa dinamika yang signifikan. Dimensi transmisi, atau penyampaian informasi dari pemangku kebijakan ke pelaksana, belum berjalan optimal. Sosialisasi awal memang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, namun tidak diikuti dengan koordinasi rutin atau pembaruan informasi yang terstruktur. Saluran komunikasi yang digunakan cenderung bersifat satu arah, seperti surat edaran atau grup WhatsApp, yang meskipun cepat secara administratif, tidak menjamin pemahaman substantif di tingkat pelaksana. Ketidakteraturan waktu dan media komunikasi menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman, terutama di kalangan guru yang tidak mengikuti pelatihan secara langsung. Dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan juga menjadi persoalan. Sebagian guru belum memahami secara menyeluruh substansi Program Sekolah Penggerak, termasuk konsep seperti pembelajaran diferensiasi dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Informasi yang disampaikan cenderung umum dan tidak mendalam secara teknis. Minimnya panduan pelaksanaan yang rinci serta belum meratanya pelatihan mengakibatkan terjadinya disorientasi dalam pelaksanaan kebijakan di kelas. Bahkan, keterlibatan orang tua sebagai pemangku kepentingan eksternal pun belum diikuti dengan pemahaman terhadap arah kebijakan pendidikan yang baru.

Dari sisi konsistensi, ditemukan ketidaksesuaian antara arahan pusat, kebijakan daerah, dan pelaksanaan di tingkat sekolah. Perubahan kebijakan seringkali tidak diiringi dengan pembaruan juknis atau arahan teknis yang memadai. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam mengambil keputusan implementatif di sekolah. Belum adanya tim khusus komunikasi kebijakan di tingkat sekolah juga menghambat penyebaran informasi yang merata dan terdokumentasi dengan baik. Ketidakkonsistenan alur komunikasi ini menunjukkan lemahnya sistem koordinasi antara aktor pusat, daerah, dan pelaksana. Meski demikian, terdapat upaya dari pihak sekolah untuk membangun komunikasi yang lebih konsisten, seperti penyimpanan dokumen pelatihan secara digital dan pengarahan informal oleh kepala sekolah. Namun, agar komunikasi kebijakan dapat mendukung keberhasilan implementasi secara menyeluruh, diperlukan pembentukan tim komunikasi internal, penyusunan sistem pelaporan berjenjang, serta forum koordinasi rutin antar pemangku kebijakan. Hal ini penting agar seluruh elemen pelaksana memiliki pemahaman yang utuh dan seragam, sehingga kebijakan tidak hanya berhenti sebagai formalitas administratif, tetapi benar-benar mengarah pada perubahan substansial dalam praktik pembelajaran di sekolah.

(Widodo, 2010).

3.2. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong memperlihatkan bahwa aspek sumber daya manusia menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Terdapat perbedaan tingkat kesiapan antara guru yang telah mengikuti pelatihan resmi dan yang belum, di mana guru yang telah mendapatkan pelatihan mampu menyusun modul ajar dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara lebih baik. Kepemimpinan kepala sekolah yang transformatif turut mendukung peningkatan partisipasi guru dalam proses implementasi, meskipun tantangan dalam penguasaan teknologi masih ditemukan, khususnya

pada guru senior. Selain itu, pembagian tugas antar guru belum sepenuhnya didasarkan pada sistem kinerja yang terstruktur, sehingga dibutuhkan penguatan dalam manajemen SDM melalui monitoring dan pengembangan profesional berkelanjutan. Dari sisi anggaran, meskipun sekolah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik dan BOS Kinerja, proses implementasi kebijakan masih menghadapi kendala dalam pencairan dan sinkronisasi jadwal kegiatan. Ketidaksesuaian antara waktu pencairan dan kebutuhan kegiatan menyebabkan perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan program. Penggunaan platform pengelolaan keuangan seperti ARKAS dan SIPLah pun belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas sekolah. Sekolah telah menunjukkan sikap adaptif melalui inisiatif guru dan efisiensi penggunaan sumber daya lokal, namun tetap dibutuhkan ruang otonomi terbatas dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efektivitas program.

Sarana dan prasarana juga masih menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan perangkat TIK terbatas dan jaringan internet yang tidak stabil menyulitkan penerapan pembelajaran berbasis digital. Guru harus menggunakan alat pribadi dan teknologi sederhana untuk menyalahi keterbatasan tersebut. Di samping itu, distribusi bahan ajar dari pemerintah pusat yang tidak tepat waktu serta belum adanya sistem penyediaan sumber belajar yang terorganisir turut menghambat efektivitas pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur pendidikan menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan implementasi. Dalam aspek kewenangan, kepala sekolah telah memberikan pelimpahan tanggung jawab kepada unsur-unsur pelaksana di sekolah. Namun, kewenangan ini belum sepenuhnya didukung oleh regulasi formal, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan inovasi program. Sekolah masih dibatasi oleh aturan juknis pusat yang bersifat sentralistik. Untuk mendorong pelaksanaan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif, diperlukan regulasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Hal ini mencakup pelibatan guru dalam pengambilan keputusan, dukungan dinas pendidikan sebagai fasilitator, serta pelatihan literasi digital dan penyediaan perangkat pendukung pembelajaran yang merata. Tanpa penguatan sumber daya secara komprehensif, implementasi kebijakan Sekolah Penggerak akan berisiko stagnan dan tidak merata di seluruh satuan pendidikan.

3.3. Disposisi Pelaksana

Aspek disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong mencerminkan tingkat komitmen yang tinggi dari seluruh unsur pelaksana, mulai dari kepala sekolah hingga guru. Partisipasi aktif ditunjukkan melalui penyusunan jadwal kegiatan, pembentukan tim teknis, serta integrasi Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin transformatif dengan membangun kolaborasi, memberikan ruang bagi inisiatif guru, dan menjaga semangat pelaksanaan kebijakan. Namun, komitmen tinggi ini belum sepenuhnya diiringi dengan dukungan kelembagaan dan insentif formal yang dapat memperkuat keberlanjutan implementasi.

Motivasi kepala sekolah menjadi faktor penting yang menopang pelaksanaan kebijakan. Kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga aktif dalam supervisi pembelajaran, pendampingan guru, serta memfasilitasi ruang diskusi yang partisipatif. Kepemimpinan yang berbasis nilai dan kolaborasi ini menciptakan ekosistem kerja yang positif dan adaptif, mendorong rasa memiliki terhadap program, serta meningkatkan semangat guru dalam menghadapi perubahan. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun stabilitas pelaksanaan program dan memperkuat daya tahan institusi terhadap berbagai

tantangan kebijakan. Respon guru terhadap kebijakan juga menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun tidak semua guru telah mendapatkan pelatihan secara langsung, mereka menunjukkan sikap terbuka dan berusaha memahami kebijakan secara mandiri melalui diskusi internal dan forum MGMP. Guru yang mengikuti pelatihan turut berperan dalam menyebarkan informasi dan membimbing sejawat. Keterlibatan aktif ini menunjukkan bahwa guru tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga aktor pembelajar yang mampu bertransformasi menjadi agen perubahan di tingkat sekolah.

Dengan demikian, disposisi pelaksana di SMPN 3 Camplong secara umum menunjukkan fondasi yang kuat untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Agar disposisi ini terus tumbuh dan berkelanjutan, diperlukan dukungan struktural berupa pelatihan berkelanjutan, penghargaan terhadap inovasi guru, ruang partisipatif dalam pengambilan keputusan, serta peran aktif dinas pendidikan dalam memberikan pendampingan teknis. Disposisi yang kuat, jika diiringi dukungan sistemik yang memadai, akan menjadikan kebijakan Sekolah Penggerak lebih mudah diinternalisasi dan dijalankan secara berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan.

3.4. Struktur Birokrasi Sekolah

Struktur birokrasi merupakan komponen krusial dalam mendukung implementasi kebijakan secara sistematis. Di SMPN 3 Camplong, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi dari Dinas Pendidikan menyebabkan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak masih mengandalkan inisiatif kepala sekolah dan tim internal. Hal ini berdampak pada lemahnya rujukan formal yang menjadi acuan teknis pelaksanaan. Meski sekolah telah menyusun pembagian tugas dan alur kegiatan secara mandiri, belum adanya regulasi tertulis menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan secara interpretatif dan rawan inkonsistensi, khususnya saat terjadi pergantian personel. Ketidadaan SOP juga memperlemah akuntabilitas dan efektivitas koordinasi antarpelaksana. Beberapa guru dan staf belum memiliki pemahaman teknis yang seragam karena tidak adanya pedoman operasional yang baku. Meskipun terdapat konsensus internal yang terbentuk melalui komunikasi informal dan arahan kepala sekolah, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi masih bersifat personal dan belum didukung sistem kelembagaan yang kuat. Untuk itu, penyusunan SOP internal secara kolaboratif menjadi langkah strategis guna memperjelas pembagian tugas, mekanisme kerja, dan sistem evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan di sekolah masih menghadapi tantangan fragmentasi, baik secara internal maupun eksternal. Di tingkat sekolah, belum semua unit kerja terlibat secara aktif dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih banyak dilakukan oleh guru tertentu yang telah mendapatkan pelatihan. Di sisi lain, koordinasi dengan dinas pendidikan juga belum berjalan optimal. Pendampingan dari pengawas atau fasilitator bersifat sesekali dan belum terjadwal secara sistematis. Hal ini menyebabkan sekolah sering kali menafsirkan sendiri kebijakan pusat tanpa pendampingan teknis yang memadai. Untuk meminimalkan dampak fragmentasi dan memperkuat struktur birokrasi, diperlukan penguatan koordinasi internal dengan membentuk tim lintas unit, serta forum komunikasi rutin antara sekolah dan dinas pendidikan. Sinkronisasi SOP internal dengan juknis dari pusat dan daerah juga penting untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan konteks lokal. Dengan dukungan kelembagaan yang lebih kuat dan koordinasi yang terintegrasi, implementasi Program Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong akan lebih efektif, terdokumentasi, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang, dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Komunikasi dalam implementasi kebijakan telah dilakukan dengan baik. Kepala sekolah berperan aktif dalam menyampaikan arahan dari dinas pendidikan kepada seluruh guru dan staf, meskipun sosialisasi dari pihak eksternal baru dilakukan di awal program. Informasi terkait kebijakan sebagian besar berhasil diteruskan melalui forum rapat dan media informal, serta mulai diarsipkan melalui media digital sederhana. Meskipun belum sepenuhnya konsisten dan sistematis, upaya komunikasi internal telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman dasar para guru mengenai arah dan substansi kebijakan Sekolah Penggerak. (2) Sumber daya yang ada telah mendukung implementasi kebijakan sekolah penggerak. Guru-guru yang telah mengikuti pelatihan nasional menunjukkan inisiatif tinggi dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Kepala sekolah juga berperan penting dalam memfasilitasi pertemuan, diskusi pedagogik, dan distribusi perangkat ajar. Dukungan anggaran melalui DAK Non-Fisik dan BOS Kinerja telah dimanfaatkan secara bertahap, dan sekolah menunjukkan upaya penyesuaian jadwal dan skala kegiatan agar tetap sejalan dengan kebijakan. Sarana pendukung seperti laboratorium komputer dan akses internet sudah tersedia meskipun terbatas, dan guru mulai memanfaatkan teknologi secara mandiri untuk menunjang pembelajaran. (3) Disposisi pelaksana dalam implemetasi kebijakan sekolah penggerak. kepala sekolah menunjukkan sikap kepemimpinan transformatif yang mendorong terciptanya budaya kerja kolektif. Beberapa guru menunjukkan komitmen dan kreativitas tinggi, terutama dalam menyusun perangkat ajar dan melaksanakan inovasi pembelajaran. Meskipun belum ada skema insentif formal dari pemerintah, sekolah telah memberikan bentuk penghargaan non-finansial berupa dukungan moral dan pelibatan guru aktif dalam kegiatan strategis. Ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga motivasi pelaksana kebijakan. (4) Struktur birokrasi dalam implementasi sekolah penggerak, meskipun sekolah belum memiliki SOP resmi dari dinas pendidikan, kepala sekolah dan tim internal telah menyusun panduan kerja informal untuk memastikan kelangsungan program. Koordinasi antarunit di sekolah mulai diarahkan ke kerja lintas fungsi, dan dokumentasi kegiatan telah dilakukan secara mandiri sebagai bentuk akuntabilitas. Fragmentasi pelaksanaan secara perlahan mulai diatasi melalui komunikasi internal yang lebih terstruktur dan keterlibatan koordinator program dalam menghubungkan sekolah dengan pemangku kebijakan eksternal.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Sekolah Penggerak di SMPN 3 Camplong Kabupaten Sampang." Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

REFERENSI

- Abror, M. D., & Pramono, T. (2024). *Implementasi Kepmedikbudristek Ri Nomor 162/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak Di Smpn 1 Pace Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik, 1(1), 24-37.
- Adawiyah, R. A., & Musaddad, A. (2024). *Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Analisis Studi Kasus*. Islamic Edu Management Journal, 1(1), 1-12.

- Alhan, K., & Putri, S. N. (2023). *Implementasi Kebijakan Merdeka Mandiri Belajar: Studi Kasus Di UPTD SDN Pangilen 3 Sampang*. Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam, 4(1), 29-44.
- Arfani, L. (2018). *Mengurai hakikat pendidikan, belajar dan pembelajaran*. Pelita Bangsa Pelestari Pancasila, 11(2).
- Astuti, W. U. R. I. (2017). Hakikat Pendidikan. *Over The Rim*, 191-199.
- Boroallo, S. (2024). *Evaluasi Program Sekolah Pengerak Menggunakan Model Kirkpatrick di SMAS Kristen Rantepao*. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran, 6(3), 386-392.
- Bustam, B. M. R. (2021). *Filosofi Pendidikan KH Ahmad Dahlan dan Implikasinya pada Epistemologi Pendidikan Islam Kontemporer*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 6(2), 262-281.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Dewantara, A. W. (2015). *Filosofi Pendidikan yang Integral dan Humanis dalam Perspektif Mangunwijaya*. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 13(7), 3-9.
- Dewi, R. R. K., & Riani, L. P. (2024). *Institusi Pendidikan Sebagai Pilar Utama Pengembangan Human Capital Di Masa Mendatang*. Prosiding Pendidikan Ekonomi, 13-25.
- Handoyo, A. (2019). *Faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di indonesia*. In *Prosiding Seminar Nasional. Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri* (Vol. 4, pp. 20-24).
- Hidayah, N. (2022). *Pandangan terhadap problematika rendahnya mutu pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(4), 6593-6601.
- Indonesia, U. U. R. (2003). *Sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Irianto, H., Nurany, F., & Puteri, A. P. (2024). *Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemuda Tangguh*. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 8(2), 167-184.
- Irianto, H., Nurany, F., & Puteri, A. P. (2024). *Implementasi Kebijakan Program Beasiswa Pemuda Tangguh*. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 8(2), 167-184.
- Islamiyah, N. M. (2022). *Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Kota Bima, NTB)* (Master's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak*.
- Khofifah, B., & Syaifudin, M. (2023). *Analisis kebijakan pemerintah mengenai sekolah penggerak*. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(8), 7405-7410.
- Maharani, N. A., Auliyah, R., & Hazin, M. (2024). *Evaluasi Program Sekolah Penggerak Menggunakan Model Kirkpatrick di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik*. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI), 1(3), 443-449.

- Maisyura, F. (2024). *Implementasi Manajemen Sekolah Penggerak Dalam Peningkatan Proses Pembelajaran Peserta Didik di SDN 1 Trienggadeng Pidie Jaya* (Doctoral dissertation, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan).
- Masri, M., Rusdinal, R., & Gistituati, N. (2024). *Implementasi kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar*. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 8(4), 347-352.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, T. (2018). *rumusan tujuan pendidikan nasional pasal 3 undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 Tahun 2003*. Wahana Karya Ilmiah Pendidikan, 2(01).
- Novayanti, N., Warman, W., & Dwiyono, Y. (2023). *Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, 3, 151-160.
- Noventue, R., Ginanjar, S., & Astutik, A. (2024). *Hakikat Pendidikan: Menginternalisasikan Budaya Melalui Filsafat Ki Hajar Dewantara Dan Nilai-Nilai Pancasila Pada Siswa*. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP), 7(1), 2809-2818.
- Noventue, R., Ginanjar, S., & Astutik, A. (2024). *Hakikat Pendidikan: Menginternalisasikan Budaya Melalui Filsafat Ki Hajar Dewantara Dan Nilai-Nilai Pancasila Pada Siswa*. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP), 7(1), 2809-2818.
- Nurachma, D., & Arenawati, A. (2024). *Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Merdeka Belajar Di Kabupaten Pandeglang*. Niagara Scientific Journal, 16(1), 43-49.
- Nurachma, D., & Arenawati, A. (2024). *Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Merdeka Belajar Di Kabupaten Pandeglang*. Niagara Scientific Journal, 16(1), 43-49.
- Oktavia, R. (2019). *Kurangnya mutu pendidikan di indonesia*.
- Patilima, S. (2022, January). *Sekolah Penggerak sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan*. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar.
- Patilima, S. (2022, January). *Sekolah Penggerak sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan*. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar.
- Prastiwi, N. A. (2024). *Implementasi Program Sekolah Penggerak Di Smp Muhammadiyah 7 Yogyakarta*. Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, 13(1), 45-59.
- Rahmat Fadhli, E. M. (2024). *Kebijakan Pendidikan: Konsep, Model dan Isu Strategis di Indonesia*. Indonesia Emas Group.
- Ratna, E. (2024). *Manajemen Strategik Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah (Studi Kasus di SD Negeri Karangjati 03 dan SD Negeri Karangjati 04 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)* (Doctoral dissertation).
- Santosa, A. B. (2025). *Evaluasi Implementasi Program Sekolah Penggerak Di SDIT Salsabila 3 Banguntapan Bantul*. Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an, 12(1), 114-125.
- Septiani, E. (2024). *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Teori Edward III di Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara*. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(9), 287-294.
- Setiawan, I. (2024). *Kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif siswa di sekolah penggerak SMPIT Cendekia Purwakarta* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

- Sheppard, B., et al. (2018). "The Role of School Leaders in Creating a Learning Community." *UKEssays*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008),
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N., Muspawi, M., & Aprillitzavivayarti, A. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 773-779.
- Tantawi, M. F. (2024). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Implementasi Sekolah Penggerak Di SMPN 18 Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: SAGE Publications
- Zahara, N. R. *Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 pada Fungsi Kearsipan Sekretariat Ditjen Kementerian X RI*. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan*, 26(1), 2.